

**KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HAMENGKUBUWANA I DI  
KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT  
TAHUN 1755-1792 M**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

**Karunia Anas Hidayat**

NIM.: 12120049

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karunia Anas Hidayat  
NIM : 12120049  
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya  
Alamat Asli : Mlati Glondong RT 01/RW 018, Sendangadi, Mlati,  
Sleman  
Tlp/Hp : 085713482155  
Judul Skripsi :

KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HAMENGKUBUWANA I DI  
KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT  
TAHUN 1755-1792 M

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 Juni 2018

Saya yang menyatakan,



**Karunia Anas Hidayat**  
**NIM: 12120049**

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Adab dan Ilmu  
Budaya**

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HAMENGGKUBUWANA I DI  
KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT  
TAHUN 1755-1792 M**

Yang ditulis oleh:

Nama : Karunia Anas Hidayat  
NIM : 12120049  
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 04 Juni 2018

Dosen Pembimbing.



Herawati, S.Ag., M.Pd.

19720424 199903 2 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/04/PP.00.9/1444/2018

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HAMENGKUBUWANA I DI KASULTANAN  
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT TAHUN 1755-1792 M

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KARUNIA ANAS HIDAYAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 12120049  
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Juli 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Herawati, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19720424 199903 2 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.  
NIP. 19561013 198103 1 003

Penguji II

Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.  
NIP. 19710430 199703 2 002



Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.  
NIP. 19600224 198803 1 001

## **Motto:**

*“Bila Kau Tak Tahan Lelahnya Menuntut Ilmu,  
Maka Kamu Akan Menanggung Perihnya  
Kebodohan”*

(Imam Syafi'i)

Tuhan mengajarkan kita untuk terus belajar dan berusaha guna menggapai kesuksesan, dengan sabar dan tawakal. Kegagalan merupakan sebuah pembelajaran yang sangat keras untuk tetap berusaha hingga sukses dan tak mengulangi lagi arti sebuah kegagalan.

(penulis)

## **PERSEMBAHAN**

**Untuk:**

**Bapak/ Ibu tercinta serta keluarga besarku**

Terimakasih atas dukungan dan doanya yang tak kunjung putus, selalu mendoakan saya hanya dengan ridha ayah dan ibu, serta ridha Allah swt., semuanya bisa terasa lebih ringan dan mudah dalam penyelesaian skripsi ini.

**Untuk Almamater Tercinta**

**Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam**

**Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيَّ أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا  
لَنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai agama dan peradaban bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Atas jasa dan jerih payahnya kita bisa menikmati iman dan merasakan indahnya Islam dan senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari kiamat.

Penyusun menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan dan kesalahan. Selama penyusunan skripsi banyak tantangan, gangguan, dan hambatan yang penyusun rasakan. Namun semua telah berakhir,

berkat dorongan, motivasi, dan wejangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sangat berterimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan restunya kepada kami semua.
3. Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI), Sekertaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada Herawati, S.A.g., M.Pd. selaku dosen pembimbing yang ikhlas dan sabar untuk mencurahkan perhatian dalam membimbing dan memberi pengarahan terhadap skripsi ini.
5. Dr. Imam Muhsin M.Ag, selaku dosen penasehat akademik yang dengan keluasan wawasan dan keramahannya dalam membimbing penulis, baik dalam perkuliahan maupun ketika berkonsultasi. Banyak nasehat dan sarannya yang sangat bermanfaat penulis dapatkan selama menjalani proses studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen SKI yang telah membuka cakrawala pengetahuan penulis, dan segenap staf tata usaha civitas akademika Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Sukamto yang selalu memberikan pengertian, pemakluman, dan dorongan agar diselesaikannya tugas akhir ini. Kepada ibunda Rahmawati yang selalu ada untuk ku setiap saat, dan memotivasinya agar diselesaikan skripsi ini. Teruntuk adikku Danis Aveceina Amin yang aku sayangi

terimakasih atas pengertian dan candaan ketika mulai lelah dengan tugas ini. Serta seluruh keluargaku yang selalu mengingatkanku dalam kebenaran dan kesabaran.

8. Seluruh keluarga besar SKI 2012, terkhusus untuk sahabat dan saudara-saudara ku di SKI B 2012 terimakasih untuk segalanya baik canda-tawa, kegelisahan, amarah, dan rasa sayang kalian.
9. Agustin Diana Sari, yang selalu memberikan support, tenaga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Ia yang selalu membantu penulis baik moril maupun material.
10. Seluruh teman-teman ku yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.
11. Teman-teman Karang Taruna Mlati yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kenangan yang telah semuanya berikan kepada penulis, semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah swt. dan semua kesalahan baik berbentuk fisik maupun non fisik mendapatkan ampunan dari Allah swt. Terakhir penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhaluan kepada sejarah dan kebudayaan Islam.

Yogyakarta, 04 Juni 2018  
Penulis,

Karunia Anas Hidayat  
12120049

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HAMENGKU BUWONO I DI KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT TAHUN 1755-1792 M

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelarnya Sultan Hamengkubuwana I. Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak lepas dari perjanjian Giyanti antara Pangeran Mangkubumi, Pakubuwana III, dan VOC di bawah Gubernur Jenderal Jacob Mossel pada tanggal 13 Februari 1755. Melalui perjanjian ini ditetapkan bahwa wilayah kekuasaan Mataram terpecah menjadi Surakarta dan Ngayogyakarta. Pembentukan birokrasi yang kompleks dan semakin bertambahnya kebutuhan-kebutuhan kasultanan memerlukan sebuah kebijakan yang tepat demi berjalannya roda pemerintahan yang baik. Keadaan inilah yang mengharuskan Sultan Hamengkubuwana I untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tepat demi kejayaan sebuah negara dan masyarakat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upaya Sultan Hamengkubuwana I dalam menstabilkan ekonomi Kasultanan Ngayogyakarta (1755-1792).

Penelitian ini merupakan kajian sejarah ekonomi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi, serta teori John Meynard Keynes tentang *government policy* (kebijakan pemerintah). Teori di atas memiliki relevansi terhadap pengelolaan perekonomian negara. Peneliti menggunakan metode historis yang terdiri dari tahap heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan sejarah).

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, upaya Sultan Hamegkubuwana I dalam menstabilkan ekonomi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terdiri dari dua macam, pertama meningkatkan pertanian dengan menggunakan sistem pembagian wilayah dan kedua, membentuk petugas pajak dari berbagai wilayah yang selanjutnya diserahkan kepada perbendaharaan keraton. Kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I memberikan dampak positif dan negatif bagi Kasultanan Ngayogyakarta. Dampak positif terlihat pada terciptanya tata peraturan pemerintah dan pembangunan infrastruktur, sedangkan dampak negatif terlihat pada VOC yang selalu mencampuri urusan pemerintahan kasultanan.

**Kata Kunci: Sultan Hamengkubuwana I, Kebijakan Ekonomi, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Landasan Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM MATARAM ABAD XVIII M.....</b>	<b>21</b>
A. Kondisi Politik dan Pemerintahan .....	21
B. Kondisi Sosial Keagamaan.....	33
C. Kondisi Sosial Ekonomi.....	35
D. Kondisi Sosial Budaya .....	37
<b>BAB III: BENTUK-BENTUK KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HAMENGGKUBUWANA I .....</b>	<b>40</b>
A. Sumber Ekonomi .....	40
B. Sebab-sebab Munculnya Kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I .....	43
1. Kondisi wilayah Yogyakarta .....	44
2. Tingginya ekspor hasil bumi.....	46
3. Melemahnya pemasukan pajak.....	47
C. Upaya Sultan Hamengkubuwana I Menstabilkan Ekonomi .....	48
1. Kebijakan dalam bidang pertanian .....	49
2. Kebijakan fiskal.....	57
a. Pajak tanah .....	57
b. Pajak upeti.....	61

D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Ekonomi Sultan Hamengkubuwana I .....	62
1. Faktor pendukung .....	62
2. Faktor penghambat.....	65
<b>BAB IV: DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN HAMENKUBUWANA I.....</b>	<b>67</b>
A. Dampak Positif .....	68
B. Dampak Negatif .....	79
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peta Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
- Lampiran 2 : Naskah Perjanjian Giyanti
- Lampiran 3 : Lokasi Perjanjian Giyanti
- Lampiran 4 : Gambar Sultan Hamengkubuwana I



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kerajaan Mataram<sup>1</sup> yang beribukota di Surakarta tahun 1755 M pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta yang beribukota di Surakarta, di bawah pimpinan Sri Sunan Pakubuwana III dan Kasultanan Ngayogyakarta yang beribukota di Ambar Ketawang, Gamping kemudian pindah di Kota Yogyakarta di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwana I (Pangeran Mangkubumi).<sup>2</sup> Pembagian kerajaan ini ditentukan dalam perjanjian Giyanti.<sup>3</sup>

Pada tahun 1745 M Sunan Pakubuwana II sebagai raja Mataram yang beribukota di Surakarta berjanji akan memberikan daerah Sukowati<sup>4</sup> sebagai penghargaan atas jasa Pangeran Mangkubumi yang telah menumpas pemberontakan<sup>5</sup> yang dipimpin RM. Said dan Martapura kepada Pakubuwana II,

---

<sup>1</sup>Mataram tumbuh di atas sebidang tanah hutan Mentaok, anugerah yang diterima Ki Ageng Pemanahan dari Jaka Tingkir (Raja Pajang) atas jasanya dalam menumpas pemberontakan Adipati Jipang. Ia bekerja keras membuka hutan tersebut dan menjadikannya kota yang tertata. Daerah Mentaok tumbuh dan berkembang menjadi pusat kekuasaan baru, yang kemudian diberi nama Mataram. Lihat Revianto Budi Santosa, *Dari Kabanaran Menuju Yogyakarta: Sejarah Hari Jadi Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2008), hlm. 4.

<sup>2</sup>Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 1.

<sup>3</sup>Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara kompeni, Sunan Pakubuwono II, dan Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwana I) dalam pembagian wilayah yang menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan yaitu kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Lihat Sri Wintala Achmad, *Geger Bumi Mataram* (Yogyakarta :Araska,2014), hlm. 137-138.

<sup>4</sup>Sukowati adalah suatu daerah di sebelah timur laut Surakarta yang sekarang dikenal dengan nama Sragen. Lihat Purwadi, *Perjuangan Kraton Yogyakarta: Jasa Sri Sultan Hamengkubuwana I-X dalam Memakmurkan Rakyat* (Cilegon: Krakatau Press, 2003), hlm.31.

<sup>5</sup>Pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan Martapura kepada Sunan Pakubuwana II dimaksudkan untuk menenyapkan pengaruh Kompeni terhadap stabilitas politik

namun Sunan Pakubuwana II mengingkari janji dan memberikan daerah itu kepada Patih Pringgalaya<sup>6</sup>. Pangeran Mangkubumi menolak untuk memberikan daerah Sukowati kepada Pringgalaya. Ketika Gubernur Jendral Van Imhoff mengunjungi Keraton di Surakarta, Patih Pringgalaya mengadukan hal itu kepadanya. Gubernur Jendral Van Imhoff memanggil Pangeran Mangkubumi dan memarahinya di depan umum tanpa menyelidiki lebih dahulu secara mendalam tentang kasus tersebut, sehingga Pangeran Mangkubumi merasa dihina dan direndahkan martabatnya.

Hal ini yang membuat Pangeran Mangkubumi meninggalkan keraton dan pergi ke daerah Sukowati dan menggabungkan diri dengan RM. Said (Mangkunegara I). Perbuatan Jendral Van Imhoff yang dilakukan terhadap Pangeran Mangkubumi secara tidak tepat dan tidak psikologis itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan yang lama (1746-1755 M) dan hanya dapat diakhiri dengan pecahnya Kerajaan Mataram menjadi dua bagian.<sup>7</sup>

Setelah meninggalkan keraton pada tahun 1746 M, Pangeran Mangkubumi bersama RM. Said menghimpun prajurit-prajurit dan menjalankan taktik gerilya untuk melawan Sunan Pakubuwana II maupun Kompeni.<sup>8</sup> Kondisi peperangan menguntungkan bagi pihak Pangeran Mangkubumi setelah Sunan Pakubuwana II

---

Kerajaan Mataram. Lihat Djoko Soekirman, *Sejarah Kota Yogyakarta* (Jakarta: DEPDIKBUD, 1986), hlm. 4.

<sup>6</sup>Patih Pringgalaya adalah menantu Susuhunan Hamangkurat IV atau kakak ipar Pangeran Mangkubumi yang menjabat sebagai Patih oleh Sunan Pakubuwana atas usulan Jendral van Imhoff. Lihat Anton Satyo Hendriatno, *Giyanti 1755* (Tangerang: CS Book, 2006), hlm. 56.

<sup>7</sup>Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, hlm. 8-10.

<sup>8</sup>Kompeni adalah penyebutan orang-orang Jawa kepada Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), Kompeni Hindia Timur Belanda. Lihat Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*, terj. Hartono Hadikusumo dkk (Yogyakarta: MATABANGSA, 2002), hlm. xi.

sakit kritis dan meninggal tanggal 16 Desember 1749 M. Setelah meninggalnya Sunan Pakubuwana II, Pangeran Adipati Anom dinobatkan oleh Van Hohendorff sebagai Sunan Pakubuwana III. Pada hari yang sama Pangeran Mangkubumi diangkat oleh pengikutnya menjadi Sunan Mataram.<sup>9</sup>

Pada awal tahun 1750 M di saat sebagian besar Kerajaan Mataram sudah berada di tangan Pangeran Mangkubumi, Gubernur Jendral Van Imhoff jatuh sakit dan meninggal dunia lalu digantikan oleh Jendral Mossel. Direktur Jawa Van Hohendorff juga menderita sakit dan terpaksa mengundurkan diri dan diganti oleh Nicolaas Hartingh. Gubernur Jendral Mossel dan Gubernur N. Hartingh terpaksa harus menjalankan taktik yang baru untuk dapat mengakhiri perlawanan Pangeran Mangkubumi dan RM. Said dengan cara berusaha memisahkan Pangeran Mangkubumi dan RM Said agar saling bermusuhan. Upaya N. Hartingh untuk memisahkan Pangeran Mangkubumi dan RM. Said dengan cara mendekati secara terpisah dengan Pangeran Mangkubumi maupun RM. Said. Pendekatan yang dilakukan N. Hartingh menimbulkan kecurigaan antara Pangeran Mangkubumi dan RM. Said sehingga saling bermusuhan.<sup>10</sup>

Pada akhir tahun 1753 M Kompeni berhasil mengadu domba Pangeran Mangkubumi dan RM Said. Kompeni mempertemukan keduanya dengan alasan perundingan untuk perdamaian. Hartingh berhasil melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi melalui seorang perantara bernama Tuan Sarip Besar atau Syekh Syarif Ulama Islam yang datang dari Negeri Ngerum atau Turki. Tuan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>10</sup>Soedarisman, *Kadipaten Pakualaman*, hlm. 11.

Sarip yang mengaku utusan Sultan Ngerum memohon kepada Pangeran Mangkubumi agar menghentikan peperangan dengan Kompeni. Pangeran Mangkubumi memenuhi permohonan Tuan dengan syarat, yaitu: *pertama*, Pangeran Mangkubumi harus menjadi raja yang diangkat oleh rakyat bukan Kompeni. *Kedua*, Sunan Pakubuwana III tetap menjadi Raja Kartasura. *Ketiga*, pusaka keraton serta wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Permintaan Pangeran Mangkubumi ini, kemudian dikenal sebagai isi dari perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 M.<sup>11</sup>

Pada perkembangannya, setelah Sultan Hamengkubuwana I menandatangani perjanjian Giyanti, wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta memerlukan tatanan birokrasi yang dibentuk dengan baik. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kasultanan yang semakin bertambah sehingga birokrasi memiliki arti penting sebagai pengatur jalannya pemerintahan. Akan tetapi, masalah yang kemudian muncul adalah sistem pembiayaan kerajaan, terutama untuk memenuhi gaji para pejabat birokrasi yang belum diatur dengan baik.<sup>12</sup>

Sebelum berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta, penertiban dan penggiatan pajak belum dilakukan dengan baik. Ketika Sultan Hamengkubuwana I berkuasa, penggiatan pajak menjadi komoditas penting sebagai sumber ekonomi kasultanan. Meningkatnya aktivitas militer menyebabkan bertambahnya kebutuhan kerajaan

---

<sup>11</sup>Maharsi, "Babad Kraton: Analisis Simbolisme Struktural, Upaya Untuk Memahami Konsep Berpikir Orang Jawa" *Disertasi* (UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 216 .

<sup>12</sup>Sri Wintala Achmad dan Krisna Bayu Adji, *Geger Bumi Mataram* (Yogyakarta: Araska, 2014), hlm. 125.

untuk membiayai militer dalam rangka usaha penaklukan wilayah kekuasaan dan menghadapi pemberontakan sebagai upaya menjaga integrasi.

Masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana I, tanah memiliki arti penting dalam kepentingan politik maupun ekonomi. Mayoritas penduduk Ngayogyakarta adalah petani. Tanah yang subur menjadi modal utama Sultan Hamengkubuwana I dalam mengembangkan kegiatan pertanian. Cara pandang agraris dan tanah sepenuhnya dikuasai oleh Sultan, melahirkan kegiatan pertanian dengan sistem feodal. Pertanian yang sejak awal menjadi sumber utama bagi rakyat perlu ditingkatkan demi kesejahteraan rakyat dan kejayaan kasultanan. Sebagaimana pendapat Keynes dalam bukunya Ramlan Surbakti yang berjudul *Memahami Ilmu Politik*, bahwa sektor pertanian pangan ditetapkan sebagai prioritas utama program pembangunan, maka diharapkan kegiatan ekonomi untuk memproduksi dan mendistribusikan sarana produksi pertanian akan meningkat.<sup>13</sup>

Sultan Hamengkubuwana I dikenal sebagai ahli tata kota.<sup>14</sup> Sebelum membangun keraton, Sultan Hamengkubuwana I melakukan penyelidikan seksama mengenai letak daerahnya, hawa udaranya, kesuburan tanah, keindahan, dan keamanan. Pada saat bersamaan, Sultan Hamengkubuwana I juga membangun pasar di utara keraton sebagai pusat perdagangan. Pembangunan pasar yang diterapkan Sultan Hamengkubuwana I merupakan alasan untuk mengumpulkan dari hasil pertanian dan banyaknya permintaan ekspor hasil bumi yang disalurkan kepada Kompeni dan Kasultanan Banten. Pasar menampung

---

<sup>13</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Grasindo, 1992), hlm. 272-273.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 388.

seluruh hasil pertanian maupun perkebunan yang ada di wilayah kerajaan dan membuat perkampungan ekonomi disekitar pasar sesuai pekerjaan penduduknya.<sup>15</sup>

Konsep pemberdayaan daerah bagi kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwana I dibedakan menjadi tiga bagian yaitu *Negari* (daerah ibu kota), *Negari Ageng* (daerah yang berada dekat ibu kota), dan *Mancanegara* (daerah yang jauh dari ibu kota namun masih dalam kekuasaan sultan). *Negari* merupakan tempat kediaman raja atau pusat dari semua. *Negari Ageng*, merupakan daerah di sekitar kota. *Mancanegara* merupakan daerah-daerah yang jauh letaknya dari *Negari* dan *Negari Ageng*. Pembagian teritorial itu bertujuan untuk memudahkan koordinasi sehingga tercipta pemerintahan yang efektif dan efisien. *Mancanegara* hanya dikuasai oleh bupati-bupati atau tuan tanah raja. Pajak diberikan kepada kerajaan untuk dikelola dan pada akhirnya dikembalikan bagi kelancaran kepentingan para pembayarinya sendiri.<sup>16</sup>

Kajian ini dianggap menarik, karena penulisan sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwana I kebanyakan mengungkap aspek politik. Penulisan tentang sejarah ekonomi belum mendapatkan porsi yang cukup. Pemaparan tentang kebijakan ekonomi menarik dan penting diteliti dilihat dari segi historis dan ekonominya, karena Sultan Hamengkubuwana I merupakan penguasa yang merintis kejayaan perekonomian

---

<sup>15</sup>Anton Satyo Hendriatmo, *Giyanti 1755: Perang Perebutan Mangkoto III dan Terpecahnya Kerajaan Mataram Menadi Surakarta dan Yogyakarta* (Tangerang: CS Book, 2006), hlm. 144-145.

<sup>16</sup>Purwadi, *Sejarah Raja-raja Jawa Sejarah Kehidupan Kraton dan Perkembangannya di Jawa* (Yogyakarta: Media Abadi, 2007), hlm. 391.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kebijakan-kebijakan untuk mengatur perkembangan perekonomian sangat penting dikarenakan pada saat itu banyak terjadi peperangan dan persaingan politik maupun ekonomi dengan bangsa Barat, terutama Belanda yang mempunyai kekuasaan di Batavia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1755-1792 M, yang bertujuan untuk memberikan informasi berkaitan tentang proses pembentukan dan perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap bagi penelitian yang mempunyai perhatian terhadap sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan sebagai media pengenalan sejarah lokal terhadap khalayak umum.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana I. Berdasarkan judul penelitian ini “Kebijakan Ekonomi Sultan Hamengkubuwana I di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1755-1792 M”, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup kajian. Kebijakan ekonomi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sebagai upaya untuk menstabilkan perekonomian negara. Upaya tersebut bertujuan untuk memakmurkan rakyat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembatasan ini diharapkan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas.

Berkaitan dengan obyek penelitian, pembatasan tahun antara 1755 M hingga 1792 M. Penelitian dimulai tahun 1755 M, karena tahun itu merupakan terbaginya Kerajaan Mataram menjadi dua kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta, serta menjadi modal awal membangun istana baru dengan penebangan hutan kayu keras sebagai pemasukan kerajaan, selain itu pada tahun 1755 M Pangeran Mangkubumi dinobatkan menjadi raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ditandai adanya perjanjian Giyanti. Penelitian ini diakhiri tahun 1792 M, karena tahun tersebut merupakan meninggalnya Sultan Hamengkubuwana I sehingga kegiatan perekonomian menjadi sorotan VOC untuk kembali mendominasi di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Berdasarkan fokus pembahasan dan batasan masalah tersebut maka dimunculkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk kebijakan ekonomi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwana I?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I terhadap Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Secara akademik untuk mendeskripsikan proses perekonomian yang terjadi dalam sejarah kerajaan Islam, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat. Hasil penelitian ini akan diperoleh pengetahuan tentang bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwana I antara tahun 1755 hingga 1792 M.

b. Untuk menjelaskan dampak kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I terhadap tata pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan infrastruktur dalam kehidupan di Kasultanan Ngayogyakarta. Sehingga menjadi salah satu faktor yang ikut mewarnai perkembangan peradaban Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian sejarah ini, berguna sebagai tinjauan pemikiran dalam menentukan kegiatan dan manajemen ekonomi negara.
- b. Sebagai sumber acuan penelitian sejarah islam bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi Kasultanan Ngayogyakarta.
- c. Sebagai pemacu para sejarawan muslim yang akan meneliti sejarah Islam, terutama di bidang ekonomi.

## D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah banyak dilakukan dalam khazanah pustaka, media cetak, maupun dalam seminar, akan tetapi buku-buku yang membahas secara khusus tentang pemerintahan Sultan Hamengkubuwana I masih terbatas, terlebih dalam kajian kebijakan ekonomi. Penelitian ini melengkapi dan menambah pembahasan yang kiranya masih terbatas dalam khazanah pustaka. Berbagai karya tulis yang memiliki kaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, buku karya Wibatsu Harianto yang berjudul, *Sultan HB I Pahlawan Pejuang Bangsa, Patriot Sejati, Peletak Dasar Demokrasi, Penyelamat Negara* (Yogyakarta: Yayasan Mandala Giri Mataram, 2000). Buku ini

menjelaskan tentang perjuangan Pangeran Mangkubumi merebut Kerajaan Mataram dari cengkaman VOC dan hanya dapat diselesaikan dengan perjanjian Giyanti. Dalam perjanjian tersebut memuat tentang kesepakatan harga dagang hasil bumi, sehingga perjanjian tersebut menjadi acuan Sultan Hamengkubuwana I dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi. Persamaan karya tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perjuangan Sultan Hamengkubuwana I merebut Kerajaan Mataram dari cengkaman VOC, sedangkan perbedaannya adalah karya tersebut tidak membahas secara spesifik mengenai perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat masa Sultan Hamengkubuwana I.

Kedua, skripsi yang ditulis Moh Nor Salim, berjudul “Beberapa Tindakan Hamengkubuwana I (1755-1792 M) dalam tinjauan doktrin Keagungbinataran”, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005. Skripsi tersebut menjelaskan tentang doktrin keagungbinataran yakni doktrin tentang konsep kekuasaan Jawa yang memandang bahwa kekuasaan itu harus bersifat ketunggalan atau utuh. Skripsi ini membahas mengenai Sultan Hamengkubuwana I dalam aspek politik. Persamaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Sultan Hamengkubuwana I dalam membangun pemerintahan yang di dalamnya membahas organisasi pemerintahan dan keagamaan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perbedaannya adalah skripsi tersebut tidak membahas secara spesifik tentang kegiatan perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat masa Sultan Hamengkubuwana I.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Kebijakan Keagamaan Sri Sultan Hamengkubuwana I di Kasultanan Yogyakarta tahun 1755-1792 M”, karya Khoirun Nisak, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001. Skripsi ini menjelaskan tentang aktivitas dan kebijakan keagamaan Sultan Hamengkubuwana I di Kasultanan Yogyakarta. Persamaan skripsi ini membahas mengenai Sultan Hamengkubuwana I yang di dalamnya juga membahas mengenai kondisi budaya, agama, dan politik. Skripsi tersebut juga menjadi acuan penelitian ini. Perbedaan di sini adalah peneliti menguraikan tentang kebijakan ekonomi Hamengkubuwana I dan dampak dari kebijakan itu terhadap kerajaan. Kebijakan keagamaan Sultan Hamengkubuwana I yang diteliti oleh Khoirun Nisak memberikan informasi kepada peneliti untuk mengembangkan penelitian dengan menjelaskan pokok permasalahan perekonomian pada masa Sultan Hamengkubuwana I.

Keempat, skripsi yang berjudul “Sekitar Perjanjian Giyanti 1755 M” (Pecahnya menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta), karya Mastingah, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang terbaginya wilayah Mataram menjadi dua kerajaan dengan ditandai perjanjian Giyanti pada tahun 1755 M. Skripsi ini memberikan informasi kepada peneliti untuk lebih jauh membahas tentang kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I di Kasultanan Ngayogyakarta setelah terjadinya perjanjian Giyanti. Persamaan skripsi dengan penelitian ini adalah mengenai isi dari perjanjian Giyanti yang menjadi acuan Sultan Hamengkubuwana I untuk

mengeluarkan kebijakan ekonomi. Perbedaan skripsi di atas adalah skripsi tersebut tidak membahas mengenai kegiatan perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat masa Sultan Hamengkubuwana I.

Kelima, buku karya dari R.M. Soemardjo Nitinegoro, yang berjudul *Sejarah Berdirinya Kota Kebudayaan Ngayogyakarta Hadiningrat* (Yogyakarta : tanpa penerbit, 1982). Pada dasarnya buku ini mengulas tentang perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Kompeni yang diakhiri dengan perjanjian Giyanti sampai awal mula berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Persamaan dari buku tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas Sultan Hamengkubuwana I dalam mendirikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perbedaan buku di atas adalah peneliti membahas mengenai kegiatan perekonomian setelah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dari beberapa karya yang telah disebutkan di atas, bahwa pembahasan secara khusus mengenai kegiatan perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat masa Sultan Hamengkubuwana I sangat diperlukan. Buku dan hasil karya di atas dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi karya-karya sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini memfokuskan kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1755-1792 M.

## E. Landasan Teori

Kebijakan diartikan sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.<sup>17</sup> Kebijakan ekonomi, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (keuangan).<sup>18</sup>

Pengambilan keputusan ekonomi dilakukan oleh pemimpin untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu diperlukan pendekatan untuk mengupas aspek yang ada dalam bahasan yaitu pendekatan sosial ekonomi. Pendekatan sosial ekonomi digunakan untuk melihat aspek ekonominya karena ekonomi dapat dikategorikan sebagai masalah sosial yang memiliki keterkaitan untuk menganalisis suatu peristiwa menggunakan ukuran-ukuran ekonomi dengan bertumpu pada produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan teori John Meynard Keynes tentang *government policy* (kebijakan pemerintah) untuk menganalisis kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I oleh negara. Menurut Keynes pemerintah harus aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara sebagai induk memiliki andil besar dalam mengatur segala aktivitas ekonomi yang ada di dalam naungannya

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1998), hlm. 115.

<sup>18</sup>Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 102.

<sup>19</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 99.

agar tercipta pengelolaan yang baik. Keynes telah mencetuskan teori tentang kebijakan dan peran pemerintah dalam perekonomian negara.<sup>20</sup> Perekonomian sebuah negara tidak akan mencapai tingkat yang tinggi tanpa campur tangan pemerintah.<sup>21</sup> Kegiatan perekonomian negara, proses ekonomi dan pemecahan masalahnya ditentukan oleh kebijakan dan peranan pemerintah. Kebijakan ekonomi bertumpu pada tiga pokok perekonomian yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

Teori di atas memiliki relevansi terhadap objek kajian tentang “Kebijakan Ekonomi Sultan Hamengkubuwana I di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat” dalam pengelolaan perekonomian negara. Pendapat Keynes yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki campur tangan dalam urusan perekonomian ini memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang pemerintah terapkan. Usaha untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan hasil pertanian sehingga mekanisme pasar dapat dikelola dengan baik. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja sebagai penguasa tunggal memiliki wewenang dalam mengatur negara.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian terhadap kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I di Ngayogyakarta (1755-1792 M) ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka

---

<sup>20</sup>Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 37.

<sup>21</sup>Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 272.

(*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian yaitu

#### 1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah usaha untuk menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak masa lalu yang dikenal sebagai data atau bukti sejarah atau kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur.<sup>22</sup> Pada tahap ini dilakukan penelitian kepustakaan melalui dokumen tertulis baik berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berupa arsip perjanjian Giyanti dan undang-undang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat antara lain arsip yang diterjemahkan oleh S Margana dan *Serat Angger anggeran Jawi (Javaansche Wetten)* diterjemahkan oleh Jumeiri Siti Rumidjah. Sumber tersebut diperoleh dari BNPB DIY.

Pencarian data selain sumber primer juga menggunakan sumber sekunder. Adapun sumber sekunder yang diperoleh dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga seperti buku *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874 dan Babad Kraton: Analisis Symbolisme Struktural, Upaya untuk Memahami Konsep Berpikir Jawa Islam*, dari BPAD DIY dan Grahatama Pustaka peneliti memperoleh sumber seperti buku *GIYANTI 1755: Perang Perebutan Mahkota III dan Terpecahnya Kerajaan Mataram menjadi Surakarta & Yogyakarta, Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, Perjuangan Kraton Yogyakarta Jasa Sri Sultan Hamengkubuwana I-X Dalam Memakmurkan Rakyat*, Ricklefs, M.C, *Yogyakarta Di Bawah Sultan*

---

<sup>22</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 100.

*Mangkubumi 1749-1792, dan Sekitar Jogjakarta 1755-1825 (Perdjandjian Gianti-Perang Dipanegara).*

## 2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah verifikasi agar mendapat data yang valid dan untuk memperoleh keabsahan sumber. Pada langkah ini dilakukan kritik, ada dua macam kritik yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern digunakan untuk menguji keotentikan sumber, sedangkan kritik intern digunakan untuk menguji kredibilitas sumber.<sup>23</sup>Tujuan kritik sumber ini adalah agar peneliti tidak menerima begitu saja semua sumber yang telah didapatkan baik itu yang berupa sumber tertulis maupun sumber lisan. Dari data-data tersebut, dipilah-pilah data yang dapat digunakan sebagai sumber kajian. Data-data yang didapat dari internet misalnya, tidak semuanya digunakan, dan dipilih data yang bersifat ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian diperoleh data yang sesuai dengan fakta sejarah.

Peneliti memilah-pilah dari sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian ini untuk dokumen tertulis yang memuat tentang sejarah Kasultanan Ngayogyakarta. Peneliti dalam hal ini berusaha mengkritik sumber-sumber yang telah didapatkan. Kritik sumber yang dilakukan oleh peneliti di antaranya mengenai tahun keluarnya Pangeran Mangkubumi dari Kerajaan Mataram, dalam buku yang berjudul *Kraton Yogyakarta, Sejarah, Nasionalisme, dan Teladan Perjuangan* karya Djoko Dwiyanto dan *Sultan HB I, Pahlawan Pejuang Bangsa*,

---

<sup>23</sup>Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 108.

*Patriot Sejati, Peletak Dasar Demokrasi, Penyelamat Negara* karya Wibatsu Harianto disebutkan bahwa tahun 1746 M Pangeran Mangkubumi keluar dari Kerajaan Mataram untuk melawan Pakubuwana II yang telah mengingkari janjinya untuk memberikan tanah Sukowati. Namun, dalam buku yang berjudul *Giyanti 1755 Perang Perebutan Mahkota III dan Terpecahnya Kerajaan Mataram Menjadi Surakarta dan Yogyakarta* karya Anton Satyo Hendrianto disebutkan bahwa Pangeran Mangkubumi keluar dari Kerajaan Mataram pada tahun 1745 M. Peneliti menggunakan tahun 1746 M dengan alasan bahwa buku tersebut merujuk pada kedatangan Gubernur Van Imhoff ke Mataram pada tahun 1746 M untuk mencegah Sunan Pakubuwana II memberikan tanah Sukowati yang dijanjikan kepada Pangeran Mangkubumi, sehingga pada tahun tersebut Pangeran Mangkubumi keluar dari Kerajaan Mataram untuk menyerang Kompeni dan Pakubuwana II.

### 3. Interpretasi (penafsiran)

Tahapan yang ketiga dalam melakukan penelitian yaitu tahap interpretasi. Pada tahap interpretasi, peneliti berusaha menghubungkan berbagai fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang ada setelah melewati verifikasi. Terdapat dua cara dalam menafsirkan data, yaitu dengan analisis dan sintesis.<sup>24</sup>

Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap sumber data yang diperoleh, guna mengembangkan tulisan lebih rinci dan mudah dipahami. Data yang didapat kemudian dikembangkan dengan cara menganalisis dan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 114.

mensintesis. Analisis berarti menguraikan sumber-sumber yang mengandung beberapa kemungkinan.<sup>25</sup> Peneliti menemukan seperti struktur pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta yang terdapat di *negari* dan *negari ageng*. Struktur tersebut terdapat keluarga kerajaan, ulama, dan rakyat biasa. Struktur pemerintahan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pegawai kerajaan dari berbagai kalangan atau bersifat terbuka. Sintesis berarti menyatukan atau mengklompokkan data-data untuk mengetahui serta memahami konsep melalui pendekatan dan teori. Pada proses menganalisis permasalahan dari penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan teori *government policy* (kebijakan pemerintah) yang telah dipaparkan pada bagian landasan teori.

#### 4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Langkah terakhir ini berisi tentang pemaparan hasil penulisan yang telah dilakukan. Peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya dalam bentuk bab-bab dan sub bab-bab yang saling berkaitan. Akhirnya penulisan ini menghasilkan rangkaian tulisan sejarah yang sistematis dan kronologis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini, peneliti memaparkan secara sistematis bagian-bagian yang dibahas. Agar mendapatkan sebuah pemahaman menyeluruh terhadap penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan dengan susunan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 100.

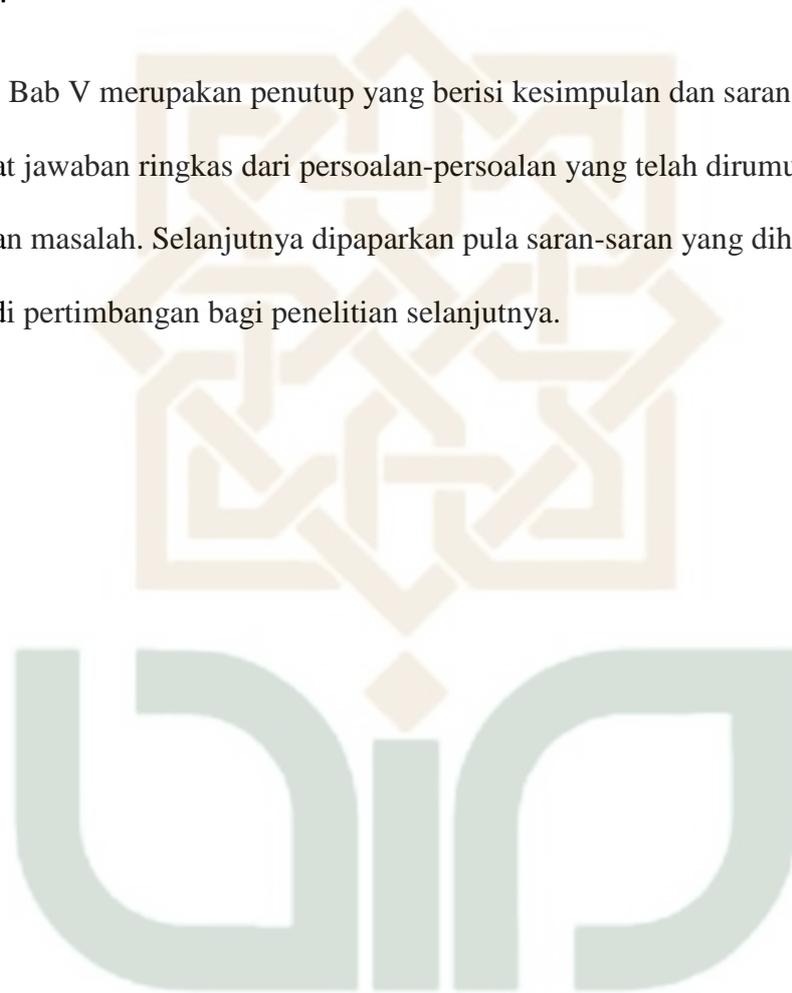
Bab I memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini diharapkan memberikan gambaran umum tentang keseluruhan dari penulisan skripsi dan sebagai dasar untuk bab-bab selanjutnya.

Bab II menguraikan tentang gambaran umum Mataram pada Abad XVIII. Pada bab ini dibahas mengenai kondisi umum dalam bidang sosial politik, agama, ekonomi dan penjelasan mengenai sistem pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembahasan ini penting, untuk menjelaskan mengenai Sultan Hamengkubuwana I sebelum membahas mengenai upaya Sultan Hamengkubuwana I dalam mengatur perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Bab III menguraikan tentang bentuk-bentuk kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwono I di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembahasan tersebut mencakup sumber ekonomi dan pengelolaanya, sebab-sebab munculnya kebijakan ekonomi sultan, upaya sultan dalam menstabilkan ekonomi negara, dan faktor pendukung dan penghambat kebijakan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Untuk melengkapi pembahasan mengenai upaya Sultan Hamengkubuwana I dalam mengatur perekonomian tersebut, penting untuk dibahas mengenai dampak dari kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubueana I yang diuraikan dalam bab keempat.

Bab IV menguraikan tentang dampak positif dan negatif kebijakan Sultan Hamengkubuwana I di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap berbagai bidang kehidupan di dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bab ini merupakan pembahasan dari bab III yang selanjutnya disimpulkan dalam bab kelima.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat jawaban ringkas dari persoalan-persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya dipaparkan pula saran-saran yang diharapkan agar menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana I (1755-1792 M), ekonomi merupakan aspek yang paling penting untuk mempertahankan keutuhan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pertanian menjadi sumber utama pendapatan Kasultanan karena wilayah Kasultanan Ngayogyakarta bersifat agraris.

Kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwana I untuk menstabilkan perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terdiri dari dua macam, yaitu kebijakan pertanian dan fiskal. Kebijakan pertanian diawali dengan mendistribusikan tanah kasultanan kepada para bangsawan dan pejabat kerajaan untuk kemudian sawah digarap oleh para petani. Pertanian dengan menggunakan sistem pembagian wilayah tersebut, Sultan mewajibkan penanaman Padi di daerah negari dan negari ageng dan penanaman Palawija di daerah mancanegara. Sebagian dari hasil pertanian diserahkan kepada kerajaan sebagai bentuk pajak.

Hasil dari Kegiatan pertanian di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta juga di jual ke pasar-pasar dan kepada VOC dengan harga yang sesuai kesepakatan dalam

perjanjin Giyanti. Kebijakan fiskal yang dilakukan Sultan Hamengkubuwana I yaitu dilakukan dengan membentuk struktur pejabat dalam pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak. Pemungutan pajak dilakukan oleh bekel dan diserahkan kepada atasannya sampai kepada pejabat yang mengurus perbendaharaan kerajaan.

Kebijakan perekonomian yang dibuat oleh Sultan Hamengkubuwana I memberikan dampak yang cukup baik bagi perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mampu menstabilkan perekonomian di wilayah kekuasaannya sehingga pihak Kompeni bergantung terhadap bahan pangan dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. perekonomian yang cukup baik memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan ulama-ulama kerajaan dalam kegiatan peribadatan dan upacara keagamaan yang bernuansa Islam.

Kebijakan ekonomi Sultan Hamengkubuwana I memberikan hasil yang cukup baik selama pemerintahannya. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwana I memberikan pengaruh bagi kehidupan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam penertiban tanah, kedudukan rakyat, para pejabat kerajaan, dan antar sesama.

Kebijakan pertanian yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwana I memberikan manfaat cukup besar bagi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Meningkatnya sebagian hasil bumi yang diperoleh dari kegiatan pertanian dan

dijual kepada Kompeni, sehingga Ngayogyakarta memiliki hubungan perdagangan dengan VOC.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah membangun beberapa tempat sebagai sarana prasarana, seperti pasar dan masjid sebagai sarana untuk masyarakat.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa tidak pantas jika penulis mengatakan penelitian ini sudah sempurna. Penulis mengharapkan kritikan yang membangun untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari penelitian ini. Penulis juga berharap untuk penelitian selanjutnya lebih baik dengan pembahasan yang komprehensif dan lebih luas terkait perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat secara keseluruhan maupun raja setelah Sultan Hamengkubuwana I.

Dengan mengkaji kepemimpinan dari para raja-raja Ngayogyakarta setelahnya yang tentunya mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang menyangkut dalam menstabilkan kerajaan, maka akan lebih banyak lagi pengetahuan tentang perekonomian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.

Achmad, Sri wintala. *Geger Bumi Mataram*. Yogyakarta:Araska,2014.

Dwiyanto, Djoko. *Kraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, & Teladan Perjuangan*.Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.

Haq, M. Zairul. *Nasionalisme Religius Kasultanan : Menguak Praktik Islam dan Ajaran Sastra Gendhing di Masa Pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma*. Bantul: Kreasi Wacana, 2012.

Harianto, Wibatsu. *Sultan HB I: Pahlawan Pejuang Bangsa, Patriot Sejati, Peletak Dasar Demokrasi, Penyelamat Negara*. Yogyakarta: Yayasan Mandara Giri Mataram, 2000.

Hendriatmo, Anton Satyo. *Giyanti 1755: Perang Perebutan Mahkota III dan Terpecahnya Kerajaan Mataram menjadi Surakarta & Yogyakarta*. Tangerang: CS Book, 2006.

Indonesia Marketing Association. *Kraton Jogja Sejarah dan Warisan Budaya*. PT. Indonesia Kebanggaanku, 2008.

Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

\_\_\_\_\_. *Pendidikan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus,2001.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.

\_\_\_\_\_. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

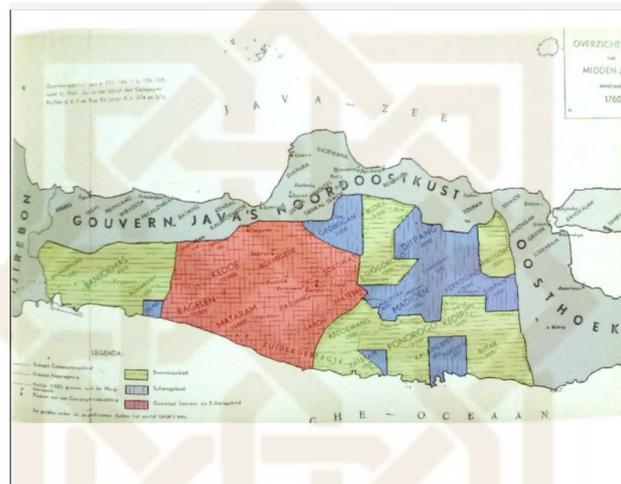
- Mallany, Yenny Retno. *Pathok Negoro Menghadapi Perubahan Zaman*. Yogyakarta: Polgov, 2016.
- Margana, S. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Praktek Persewaan Tanah Lungguh Di Kasultanan Yogyakarta Pada Masa Hamengku Buwono VII Tahun 1877-1921*. Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2009.
- Masjkuri dan Kutoyo, Sutrisno. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: DEPDIKBUD, 1976/1977.
- Moedjanto. *Konsep Kekuasaan Jawa: penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen, Antara 1755-1992*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Nitinegoro, Soemardjo. *Berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat*. tk: t.p, t.t.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman. *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1985.
- Purwadi. *Perjuangan Kraton Yogyakarta Jasa Sri Sultan Hamengkubuwana I-X Dalam Memakmurkan Rakyat*. Cilegon: Krakatau Press, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Raja-raja Jawa Sejarah Kehidupan Kraton dan Perkembanganya di Jawa*. Yogyakarta: Media Abadi, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Pemerintahan Kerajaan Jawa Klasik*. Medan: Pujakesuma, 2007.
- Raffles, Thomas Stamford. *The History Of Java*, terj. Eko Prastyaningrum, Yogyakarta: Narasi, 2014.
- Rama, Ageng Pangestu. *Kebudayaan Jawa Ragam Kehidupan Kraton dan Masyarakat di Jawa 1222-1998*. Yogyakarta: Cahaya Ningrat, 2007.
- Ricklefs, M.C. *Yogyakarta Di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792*, terj. Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.

- Sabdacarakatama. *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Sastroharjatmo, Moelyono. *Babad Nitik Ngayogya*, Jakarta: Depdikbud, 1987.
- Soekanto. *Sekitar Jogjakarta 1755-1825 (Perdjandjian Gianti-Perang Dipanegara)*. Djakarta: Mahabarata, 1952.
- Soekirman, Djoko. dkk. *Sejarah Kota Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud, 1986.
- Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikro ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Suroto, Noto. *Kesultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Depdikbud, 1985-1986.
- T.Roorda. *Serat Angger Anggeran Jawi (Javaansche Wetten)*, terj. Jumeiri Siti Rumidjah. Yogyakarta: Kepel Press, 2002.
- Usman, Sunyoto. dkk. *Malioboro*. Yogyakarta: Mitra Tata Persada, 2006.
- Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Yusuf, Mundzirin. *Makna dan Fungsi Gunungan Pada Upacara Garebeg di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*. Yogyakarta: Amanah, 2009.
- Tim Pengkajian Lembaga Penelitian Pengkajian Sejarah dan Antropologi. *Toponim Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kota Yogyakarta, 2007.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1998.
- Skripsi dan Desertasi :
- Maharsi. “Babad Kraton: Analisis Symbolisme Struktural, Upaya Untuk Memahami Konsep Berpikir Jawa Islam”. *Disertasi Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2007. Tidak diterbitkan.

- Mastingah. “Sekitar Perjanjian Giyanti 1755 M (Pecahnya menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta)”. *Skripsi* Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. 2001. Tidak diterbitkan.
- Munawar, Zain. “Kebijakan Ekonomi Sultan Agung Pada Masa Kerajaan Mataram Islam Tahun 1613-1645 M”. *Skripsi* Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. 2015. Tidak diterbitkan.
- Nisak, Khoirun. “Kebijakan Keagamaan Sri Sultan Hamengkubuwono I di Kasultanan Yogyakarta tahun 1755-1792”. *Skripsi* Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. 2001. Tidak diterbitkan.
- Salim, Moh Nor. “Beberapa Tindakan Hamengkubuwana I (1755-1792) dalam tinjauan doktrin Keagungan”. *Skripsi* Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. 2005. Tidak diterbitkan.

## LAMPIRAN LAMPIRAN

## Lampiran 1

Peta Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Ensiklopedia, *Kraton Yogyakarta* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2009), hlm 20.

## Lampiran 2

Naskah Perjanjian Giyanti<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Indonesia Marketing Association, *Kraton Jogja Sejarah dan Warisan Budaya*(PT. Indonesia Kebangaanku, 2008), hlm.112.

## Lampiran 3

## Lokasi Perjanjian Giyanti



UIN

## Lampiran 4

Gambar Sultan Hamengkubuwana I<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Indonesia Marketing Association, *Kraton Jogja Sejarah dan Warisan Budaya*(PT. Indonesia Kebanggaanku, 2008), hlm.111.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Karunia Anas Hidayat  
Tempat & Tgl. Lahir : Sleman, 18 Maret 1994  
Nama Ayah : Sukamto  
Nama Ibu : Rahmawati  
Alamat Rumah : Mlati Glondong RT 01/RW 018, Sendangadi  
Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
e-mail : Anazhidayat18@gmail.com  
No.Hp : 081233704855

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah Blunyah : Tahun 2006
2. PP. Darussalam Gontor Ponorogo : Tahun 2009
3. MAN Pakem Sleman : Tahun 2012

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum HMI Komisariat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
2. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Yogyakarta
3. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Yogyakarta
4. Pengurus Ikatan Mahasiswa Sleman
5. Sekretaris Takmir Masjid Al-ikhlas periode 2016-Sekarang
6. Ketua Pemuda Mlati Glondong periode 2015-2018
7. Anggota Karang Taruna Desa Sendangadi
8. Bidang Komunikasi PHBI Desa Sendangadi
9. Ketua Karang Taruna Kecamatan Mlati periode 2018-2022